J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Peran Pembiayaan Industri Halal di BMT: Sebuah Kajian Literatur Tentang Tantangan dan Pengembangan

Sastri Aida Zuhra[1], Sugianto[2]
[1.2]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
E-mail: sastriaida4@gmail.com[1], sugiantosaobi@gmail.com[2]

Article History:
Received: 05 November 2024
Revised: 08 Desember 2024
Accepted: 11 Desember 2024

Keywords: *Pembiayaan Syariah, Industri Halal, BMT*

Abstract: *Industri halal di Indonesia terus berkembang pesat, namun akses pembiayaan syariah yang mencukupi masih menjadi tantangan, terutama bagi UMKM. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diharapkan dapat berperan dalam menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran BMT dalam pembiayaan industri halal serta mengidentifikasi tantangan dan strategi pengembangannya. Dengan menggunakan pendekatan literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber akademis terkait peran BMT, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang bisa diterapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa BMT memiliki peran penting dalam memberikan akses pembiayaan bagi pelaku industri halal, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, regulasi yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Beberapa strategi pengembangan yang diusulkan antara lain memperluas akses ke pendanaan eksternal, berkolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya, serta meningkatkan literasi keuangan syariah. Kesimpulannya, peran BMT sangat penting dalam mendukung pertumbuhan industri halal, dan diperlukan kebijakan serta edukasi yang lebih baik untuk memperkuat pembiayaan syariah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah di Indonesia telah menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi umat, terutama setelah adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan produk halal. Dalam konteks ekonomi Islam, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang bertujuan memberikan layanan finansial berbasis syariah kepada masyarakat kecil hingga menengah. Sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pengembangan sektor mikro, BMT tidak hanya mengelola simpanan dan pembiayaan, tetapi juga menjalankan peran sosial melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Peran ini menjadi sangat relevan dalam mendukung tumbuhnya industri halal yang memiliki potensi besar di Indonesia.

Menurut (Martin et al., 2020), industri halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga mencakup pariwisata, keuangan, serta produk-produk gaya hidup lainnya. Seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim global, permintaan terhadap produk halal terus meningkat, menciptakan peluang besar bagi lembaga keuangan seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) untuk memainkan peran sentral dalam mendukung sektor ini. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung industri halal di Indonesia (Zainuddin Zainuddin, 2021). BMT tidak hanya berfokus pada pengelolaan simpanan dan pembiayaan, tetapi juga menjalankan peran sosial melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, yang relevan dalam mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia (Christanti et al., 2023).

Meskipun memiliki potensi besar, BMT masih menghadapi berbagai tantangan, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses modal yang cukup untuk mendanai usaha kecil dan menengah dalam skala besar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Meranti & Yazid, 2021), BMT sering kali menghadapi keterbatasan dana yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan pembiayaan yang cukup bagi para pengusaha UMKM yang bergerak di sektor halal. Selain itu, masalah tata kelola yang belum optimal dan kurangnya digitalisasi dalam operasional BMT menjadi kendala yang signifikan, seperti yang diungkapkan oleh (Cahyono et al., 2024), di sisi lain menurut (Ab Talib et al., 2020), peran pemerintah dalam mendukung industri halal melalui pembiayaan dan kebijakan logistik halal masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut.

Pemerintah dapat berperan dalam memperkuat kerangka regulasi dan memberikan dukungan finansial kepada BMT, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur dan teknologi yang mendukung ekosistem halal. Digitalisasi, misalnya, dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi operasional BMT, seperti yang diungkapkan oleh (Fatah et al., 2023), di mana penggunaan aplikasi mobile telah terbukti meningkatkan pendapatan berbasis biaya di beberapa KSPPS BMT. Selain itu, industri halal di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan global, seperti persaingan dengan produk-produk impor halal dari negara lain dan peningkatan standar halal internasional. Hal ini mengharuskan para pelaku industri halal, termasuk BMT, untuk terus berinovasi dan memperkuat daya saingnya di pasar internasional. Dalam konteks ini, BMT memiliki peluang untuk berperan lebih besar dalam mendukung ekspansi usaha kecil dan menengah yang bergerak di industri halal, dengan memberikan pembiayaan yang kompetitif dan berbasis syariah.

Penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai peran pembiayaan BMT dalam mendukung industri halal. Kajian ini tidak hanya akan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh BMT, tetapi juga mengidentifikasi peluang pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran BMT dalam ekosistem halal. Kajian ini akan difokuskan pada tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh BMT dalam menyediakan pembiayaan bagi industri halal, serta strategi-strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan peran BMT dalam mendukung perkembangan industri ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan-tantangan yang dihadapi oleh BMT dalam mendukung pembiayaan industri halal di Indonesia. Beberapa masalah utama yang ingin dipecahkan adalah keterbatasan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor halal, rendahnya adopsi teknologi digital yang mendukung efisiensi operasional BMT, serta kurang optimalnya tata kelola dan regulasi yang mendukung pembiayaan syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini mencangkup tiga fokus, yakni untuk mengetahui tantangan utama yang dihadapi oleh BMT dalam mendukung pembiayaan industry halal, bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut, apa saja peluang yang

dapat dimanfaatkan oleh BMT untuk memperkuat perannya dalam ekosistem industri halal di Indonesia.

Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Meranti & Yazid, 2021) serta (Mubarrok et al., 2022), hanya membahas peran BMT dalam pengembangan ekonomi umum atau sektor UMKM, tanpa menyentuh secara spesifik tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan industri halal. Kemudian terhadap minimnya pembahasan tentang sinergi antara BMT dan industri halal di masa pasca pandemi telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Misalnya, (Christanti et al., 2023), lebih banyak membahas tantangan umum industri halal setelah pandemi tanpa menggali secara mendalam peran BMT. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai peran BMT dalam mendukung UMKM halal pasca pandemi. Begitupun dengan kajian tentang digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional BMT masih jarang ditemukan. (Jain & Elmariah, 2022), serta (Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa, 2024), menyinggung pentingnya inovasi, namun tidak mengaitkannya secara khusus dengan peran BMT dalam pembiayaan industri halal. Penelitian ini akan membahas lebih dalam tentang digitalisasi sebagai solusi utama untuk tantangan operasional BMT. Terakhir keterkaitan antara kebijakan pemerintah dan optimalisasi peran BMT dalam mendukung industri halal belum banyak diteliti. Studi-studi seperti (Anas et al., 2022), serta (Resosudarmo & Abdurohman, 2018), menyoroti kebijakan ekonomi, tetapi belum mengeksplorasi sinergi yang optimal antara pemerintah dan BMT dalam ekosistem industri halal. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji peran regulasi dalam memperkuat pembiayaan syariah.

Dari latar belakang dan penelitian sebelumnya di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengahdirkan Temuan baru yang mencangkup tiga fokus, yakni untuk mengetahui tantangan utama yang dihadapi oleh BMT dalam mendukung pembiayaan industry halal, bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut, apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan oleh BMT untuk memperkuat perannya dalam ekosistem industri halal di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Industri Halal

Industri halal mengacu pada semua kegiatan ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut (Yuningsih M et al., 2023), industri halal telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim di seluruh dunia akan pentingnya mengonsumsi produk dan layanan yang sesuai dengan ajaran Islam. Perkembangan ini tidak hanya terbatas pada produk makanan, tetapi juga merambah ke berbagai sektor seperti farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, dan logistik halal. Penelitian (Ab Talib et al., 2020), menekankan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mempromosikan industri halal, terutama melalui dukungan terhadap logistik halal. Mereka berpendapat bahwa promosi industri halal harus melibatkan regulasi yang kuat, sertifikasi yang andal, dan peningkatan kapasitas operasional, termasuk infrastruktur yang mendukung rantai pasokan halal. Hal ini penting untuk menjaga integritas produk halal dari sumber hingga konsumen akhir.

Menurut (Utomo et al., 2020), ekosistem keuangan syariah yang solid juga menjadi landasan penting bagi keberlanjutan industri halal, dalam penelitian mereka, disebutkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem keuangan syariah agar lebih kompetitif di pasar global. Sistem keuangan syariah ini tidak hanya mencakup perbankan dan asuransi syariah, tetapi juga institusi-institusi keuangan mikro syariah seperti BMT yang memainkan peran penting dalam mendukung industri halal, terutama untuk sektor UMKM. Industri halal juga menghadapi beberapa

tantangan, salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah dan halal di kalangan masyarakat luas, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut (Wulandari, 2019), peningkatan literasi ini merupakan kunci untuk memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk-produk halal dan layanan keuangan syariah, serta memahami nilai tambah dari produk-produk tersebut. Literasi halal yang rendah dapat menghambat perkembangan industri, mengingat bahwa adopsi produk halal bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap sertifikasi dan kepatuhan Syariah, dalam hal perkembangan ekonomi. Penelitian (Cahyono et al., 2024), menunjukkan bahwa industri halal memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, di Indonesia, perkembangan industri halal telah diakui sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, terutama dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang bergerak di sektor halal. Namun, untuk mendukung industri halal ini secara menyeluruh, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, institusi keuangan syariah, serta pelaku industri itu sendiri.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi sebagai perantara pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Menurut (Meranti & Yazid, 2021), BMT memiliki dua peran utama: *Baitul Maal*, yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta *Baitul Tamwil*, yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dan komersial seperti simpan pinjam dan pembiayaan bagi masyarakat miskin. Kombinasi antara kedua peran ini memungkinkan BMT untuk memberikan kontribusi yang unik terhadap pembangunan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Penelitian (Mubarrok et al., 2022), menyoroti pentingnya BMT dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, terutama dalam hal pembiayaan untuk sektor usaha kecil. Penelitian ini mengungkapkan bahwa BMT menjadi salah satu penggerak utama bagi UMKM yang memerlukan akses modal untuk mengembangkan bisnis mereka. BMT juga berperan sebagai katalisator bagi pengembangan ekonomi syariah di wilayah-wilayah terpencil, di mana akses terhadap perbankan syariah formal seringkali terbatas. Penelitian (Rahmawati & Djuanda., 2024), menyatakan bahwa model operasional BMT bersifat inklusif, di mana fokus utamanya adalah memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan pinjaman tanpa riba. BMT beroperasi dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam rangka membangun ekonomi umat yang lebih merata. Penggunaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan merupakan salah satu keunikan dari BMT yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Dalam konteks ini, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, namun demikian, BMT juga menghadapi berbagai tantangan operasional, terutama terkait dengan tata kelola dan regulasi yang kurang jelas.

Menurut (Ramdani Harahap & Ghozali, 2020), beberapa BMT di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam hal manajemen risiko dan pengelolaan sumber daya manusia, yang berdampak pada keberlanjutan operasi mereka. Selain itu, BMT juga menghadapi masalah terkait keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi, yang membatasi kemampuan mereka untuk bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Penggunaan teknologi digital dalam operasional BMT menjadi salah satu solusi yang diusulkan oleh beberapa peneliti untuk mengatasi tantangan ini. (Fatah et al., 2023), menyoroti potensi penggunaan aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi operasional BMT dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang lebih luas. Aplikasi mobile memungkinkan BMT untuk meningkatkan pendapatan berbasis

biaya, serta memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien kepada nasabah. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi kunci dalam pengembangan BMT ke depan. Selain itu, (Elwardah, 2020), menyoroti perlunya optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkuat manajemen risiko dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang tepat, BMT dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah ini.

Pembiayaan Syariah untuk Industri Halal

Pembiayaan syariah memainkan peran penting dalam mendukung industri halal, terutama dalam memberikan modal kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor ini. (Ahmad, 2022), menekankan pentingnya lembaga keuangan syariah seperti BMT dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi model yang umum digunakan oleh BMT dalam memberikan modal kerja kepada pelaku industri halal. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses modal tanpa harus khawatir dengan bunga yang bertentangan dengan syariah. Penelitian (Cahyono et al., 2024), menyebutkan bahwa pengembangan model bisnis yang inklusif berbasis digital dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam sektor halal. Pembiayaan syariah melalui BMT dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, di mana pelaku usaha kecil mendapatkan akses yang setara terhadap modal, dengan memanfaatkan teknologi digital, BMT dapat mempercepat proses pembiayaan dan mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan pinjaman.

Penelitian (Wulandari, 2019), menyatakan bahwa salah satu bentuk pembiayaan syariah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat bawah adalah *qardhul hassan*. Ini adalah bentuk pembiayaan yang tidak melibatkan unsur komersial dan diberikan dengan niat untuk membantu pelaku usaha kecil tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk bunga. Dalam konteks industri halal, *qardhul hassan* dapat digunakan untuk memberikan modal kepada pelaku usaha mikro yang baru memulai bisnisnya dan belum mampu membayar bagi hasil dari pendapatan mereka. Namun, tantangan utama dalam pembiayaan syariah untuk industri halal adalah rendahnya akses terhadap sumber daya modal. (Utomo et al., 2020), menekankan bahwa untuk meningkatkan kinerja industri halal, diperlukan dukungan keuangan yang lebih besar dari lembaga keuangan syariah, terutama untuk sektor UMKM. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih terintegrasi, di mana lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku industri halal dapat bekerja sama untuk memperkuat modal dan mendorong pertumbuhan sektor ini. Penelitian (Meranti & Yazid, 2021), juga menyoroti pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung pembiayaan industri halal. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memudahkan akses pelaku usaha ke pasar global yang semakin menuntut kepatuhan terhadap standar halal. BMT dapat berperan sebagai perantara yang membantu pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi ini, sekaligus menyediakan modal yang diperlukan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas halal.

METODOLOGI

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Kajian literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada identifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan pembiayaan industri halal oleh Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT). Sumber data berasal dari berbagai referensi akademik yang kredibel, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan industri halal, pembiayaan syariah, serta peran BMT dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Beragam literatur yang dikaji mencakup karya-karya terbaru, seperti studi oleh (Adamsah & Subakti, 2022), yang mengkaji perkembangan industri halal serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, penelitian oleh (Ahmad, 2022) dan (Wulandari, 2019), juga diintegrasikan untuk memahami peran strategis lembaga keuangan syariah khususnya BMT, dalam mendukung sektor ekonomi halal. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai kebijakan pemerintah, regulasi pembiayaan syariah, model pembiayaan BMT, serta tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur pada jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diakses melalui platform akademik seperti Google Scholar, *ResearchGate*, serta basis data ilmiah lainnya. Kajian ini difokuskan pada penelitian yang relevan dengan topik pembiayaan syariah dan industri halal untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan dari literatur yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini dianggap tepat, sebagaimana disarankan oleh (Adamsah & Subakti, 2022), karena mampu menggambarkan fenomena yang kompleks dalam pengembangan industri halal dan pembiayaan syariah di Indonesia, terutama dalam konteks peran BMT. Analisis ini mencakup beberapa aspek kunci, seperti kebijakan pemerintah dalam mendukung industri halal (Ab Talib et al., 2020), peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Meranti & Yazid, 2021), serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembiayaan syariah untuk industri halal (Wulandari, 2019). Lebih lanjut, analisis ini juga mengeksplorasi dampak ekonomi dari pengembangan industri halal terhadap perekonomian Indonesia, seperti yang dibahas oleh (Utomo et al., 2020) dan (Ahmad, 2022). Data yang diperoleh dianalisis, di mana tema-tema utama seperti peran BMT, tantangan pembiayaan syariah, dan kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi diidentifikasi dan dibahas secara mendalam. Setiap temuan dari literatur yang relevan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) dan kebaruan penelitian dalam konteks pengembangan pembiayaan industri halal di Indonesia, dengan metode analisis kualitatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan pembiayaan syariah untuk industri halal, khususnya melalui BMT. Analisis ini juga memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola penting dan memberikan wawasan yang lebih kaya terkait dengan topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BMT dalam Pembiayaan Industri Halal

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memainkan peran sentral dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia, khususnya melalui skema pembiayaan syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, dan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga sosial (Baitul Maal) dan lembaga bisnis (Baitul Tamwil). Kedua fungsi ini memungkinkan BMT untuk berperan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama dalam mendukung sektor industri halal yang semakin berkembang. Sebagai lembaga yang berbasis syariah, BMT menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli). Produk-

produk ini dirancang untuk membantu pengusaha kecil dan menengah, termasuk pelaku industri halal, dalam mendapatkan akses pembiayaan yang etis dan bebas dari riba. Menurut (Ahmad, 2022), peran strategis BMT dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis halal sangat penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia, dengan memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, BMT tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, (Meranti & Yazid, 2021), menyatakan bahwa BMT juga memiliki peran dalam meningkatkan daya saing ekonomi syariah melalui pemberian pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku industri halal. Peran ini sangat krusial mengingat bahwa banyak pelaku usaha halal berasal dari sektor UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. BMT, melalui program pembiayaannya, membantu UMKM tersebut untuk memperluas jangkauan produk mereka dan meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Penelitian (Elwardah, 2020), menambahkan bahwa optimalisasi pembiayaan yang diberikan oleh BMT berperan dalam meminimalkan masalah keuangan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha kecil. BMT memberikan solusi pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan bagi pelaku industri halal, tetapi juga membantu menciptakan stabilitas keuangan di kalangan pengusaha kecil. Hal ini menjadi landasan bagi keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang, yang pada gilirannya memperkuat ekosistem industri halal secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian oleh (Mubarrok et al., 2022), juga menyatakan bahwa BMT memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya melalui pembiayaan industri halal. Melalui program pembiayaan syariah, BMT mampu mendorong tumbuhnya industri-industri halal di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, BMT tidak hanya berperan dalam pemberian pembiayaan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memperkuat infrastruktur ekonomi halal yang berkelanjutan. Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dikemukakan oleh (Harahap & Ghozali, 2020), dalam penelitian mereka mengidentifikasi peran BMT dalam pengembangan ekonomi umat, menekankan pentingnya dukungan pembiayaan untuk memperkuat industri halal di tingkat lokal.

Tantangan yang Dihadapi BMT

Meskipun BMT memiliki peran penting dalam mendukung industri halal, lembaga ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya modal. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT sering kali menghadapi kendala dalam mengakses modal yang cukup untuk mendukung ekspansi usaha dan memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi pelaku industri halal. (Fatah et al., 2023), menunjukkan bahwa keterbatasan modal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya dukungan dari lembaga keuangan yang lebih besar serta minimnya akses terhadap sumber pendanaan eksternal. Selain itu, tantangan regulasi juga menjadi faktor yang menghambat perkembangan BMT dalam mendukung industri halal. Menurut (Ab Talib et al., 2020), meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung industri halal, regulasi yang ada sering kali kurang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Ketidakjelasan dalam regulasi serta kebijakan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menyebabkan BMT kesulitan dalam mengoptimalkan peran mereka. (Elwardah, 2020), juga mengemukakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah, termasuk layanan yang disediakan oleh BMT masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara produk keuangan syariah dan konvensional, yang menyebabkan tingkat adopsi terhadap layanan BMT belum

optimal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BMT dalam memperluas basis nasabah mereka, terutama di kalangan pelaku industri halal yang seharusnya menjadi target utama mereka.

Tantangan lain yang dihadapi oleh BMT adalah risiko pembiayaan. (Mubarrok et al., 2022), menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan di BMT cenderung lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan lainnya, terutama karena sebagian besar nasabah BMT berasal dari kalangan pengusaha kecil yang memiliki tingkat ketahanan finansial yang rendah. Masalah pembiayaan bermasalah *(non-performing financing)* sering kali menjadi hambatan bagi BMT dalam menjaga stabilitas keuangan mereka. (Elwardah, 2020), juga menambahkan bahwa kurangnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengelola keuangan mereka turut menyumbang pada tingginya risiko pembiayaan. Penelitian terdahulu yang relevan yaitu kajian oleh (Wulandari, 2019), meneliti tantangan yang dihadapi oleh BMT dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM, menyoroti pentingnya pemahaman tentang produk keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Strategi Pengembangan Pembiayaan Industri Halal di BMT

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, BMT perlu mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan pembiayaan industri halal. Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan eksternal. Menurut (Adamsah & Subakti, 2022), pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan akses pendanaan bagi lembaga keuangan mikro syariah termasuk BMT, melalui berbagai program stimulus ekonomi dan kebijakan pembiayaan yang mendukung pertumbuhan industri halal. Berdasarkan kajian (Utomo et al., 2020), yang menekankan pentingnya kolaborasi antara BMT dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan. Dengan menjalin kemitraan strategis, BMT dapat memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber pendanaan dan memperluas jangkauan layanan mereka kepada pelaku industri halal. Kolaborasi ini juga dapat membantu BMT dalam mengelola risiko pembiayaan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Inovasi produk keuangan syariah juga menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan pembiayaan industri halal di BMT. Menurut (Cahyono et al., 2024), pengembangan model bisnis inklusif berbasis digital dapat menjadi solusi untuk memperluas akses keuangan bagi pelaku industri halal, dengan memanfaatkan teknologi digital, BMT dapat memberikan layanan pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau, serta meningkatkan daya saing mereka di era ekonomi digital. Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga merupakan strategi penting yang perlu dilakukan oleh BMT. Menurut (Wulandari, 2019), peningkatan literasi keuangan dapat membantu masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, untuk lebih memahami manfaat dari produk keuangan syariah dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Program-program edukasi dan sosialisasi tentang keuangan syariah dapat membantu BMT dalam memperluas basis nasabah mereka dan meningkatkan adopsi layanan pembiayaan syariah.

Terakhir, optimalisasi manajemen risiko merupakan langkah krusial bagi BMT untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan industri halal. (Elwardah, 2020), menyarankan bahwa BMT perlu memperkuat sistem manajemen risiko mereka, terutama dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Penggunaan teknologi finansial (fintech) dan sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu BMT dalam memantau kinerja pembiayaan dan mengidentifikasi risiko sejak dini, sehingga dapat diambil tindakan mitigasi yang tepat waktu. Penelitian terdahulu yang relevan dengan hal ini yaitu penelitian oleh (Yuningsih M et al., 2023), yang mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan industri halal, mengedepankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam produk keuangan.

KESIMPULAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki peran krusial dalam mendukung pembiayaan industri halal di Indonesia, dengan prinsip keuangan syariah, BMT tidak hanya menawarkan akses pembiayaan bagi pelaku industri halal terutama UMKM, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif. Namun, BMT juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, regulasi yang kurang mendukung, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan berbagai strategi pengembangan, seperti peningkatan akses terhadap sumber pendanaan eksternal, kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya, serta edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran BMT dalam ekosistem industri halal dan mendorong kebijakan yang lebih mendukung bagi lembaga keuangan mikro syariah. Dengan demikian, keberlanjutan dan pertumbuhan industri halal dapat tercapai, serta dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

Ab Talib, M. S., Pang, L. L., & Ngah, A. H. (2020). The Role Of Government In Promoting Halal Logistics: A Systematic Literature Review. *Journal Of Islamic Marketing*, *12*(9), 1682–1708. Https://Doi.Org/10.1108/JIMA-05-2020-0124

Adamsah, B., & Subakti, E. (2022). Development Of The Halal Industry On Indonesian Economic Growth. *Indonesia Journal Of Halal*, *5*(1), 71–75.

Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *1*(4), 1–18.

Anas, T., Hill, H., Narjoko, D., & Putra, C. T. (2022). The Indonesian Economy In Turbulent Times. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, *58*(3), 241–271. Https://Doi.Org/10.1080/00074918.2022.2133344

Cahyono, H., Sustantri, & Mala, I. K. (2024). Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Maal Wal Tamwil (BMT). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 1326–1341.

Christanti, Y. D., Widodo, N. M., & Daroji, C. (2023). Development Of The Halal Industry In Indonesia: Opportunities And Challenges After The Covid-19 Pandemic. *Journal Of Modern Islamic Studies And Civilization*, *1*(03), 101–123. Https://Doi.Org/10.59653/Jmisc.V1i03.194

Dezern, A. E., Zahurak, M., Symons, H. J., Cooke, K. R., Huff, C. A., Jain, T., Swinnen, L. J., Imus, P. H., Wagner-Johnston, N. D., Ambinder, R. F., Levis, M., Luznik, L., Bolaños-Meade, J., Fuchs, E. J., Jones, R. J., & Brodsky, R. A. (2023). Alternative Donor BMT With Posttransplant Cyclophosphamide As Initial Therapy For Acquired Severe Aplastic Anemia. *Blood*, *141*(25), 3031–3038. Https://Doi.Org/10.1182/Blood.2023020435

Elwardah, K. (2020). Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(2), 59. Https://Doi.Org/10.29300/Aij.V6i2.3351

Fatah, I. M., Asnawi, N., Segaf, & Parmujianto. (2023). Case Study At KSPPS BMT UGT Nusantara Indonesia An Analysis Of Using Mobile Applications To Increase Fee-Based Income. *Enrichment: Journal Of Management*, *13*(2), 1182–1191.

Jain, A. G., & Elmariah, H. (2022). BMT For Myelodysplastic Syndrome: When And Where And How. *Frontiers In Oncology*, *11*(January), 1–13.

Https://Doi.Org/10.3389/Fonc.2021.771614

Martín, J. C., Orden-Cruz, C., & Zergane, S. (2020). Islamic Finance And Halal Tourism: An Unexplored Bridge For Smart Specialization. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(14), 1–15. Https://Doi.Org/10.3390/Su12145736

Meranti, I. D. I., & Yazid, A. A. (2021). Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *12*(01), 31–38. Https://Doi.Org/10.59943/Economic.V12i01.64

Mubarrok, U. S., Saputra, B. M., & Izzulhaq, M. A. (2022). Strategi Optimalisasi Peran BMT Dalam Membangun Perekonomian Jawa Timur. *Musyarakah: Journal Of Sharia Economic (MJSE)*, *2*(1), 43–53. Https://Doi.Org/10.24269/Mjse.V2i1.5142

Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa. (2024). *HARE: Sharia Economic Review*. *1*(1), 12–19.

Rahmawati, R., & Djuanda Bogor, U. (2024). Implementasi Kebijakan Kampung Wisata. *Ekonometrika: Jurnal Ilmiah Ekonomi Terapan Https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Jiet Implementasi Kebijakan Kampung Wisata*. *4*(2), 70–82. Https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Jiet

Ramdani Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1). Https://Doi.Org/10.30829/Hf.V7i1.4058

Resosudarmo, B. P., & Abdurohman. (2018). Is Being Stuck With A Five Percent Growth Rate A New Normal For Indonesia? *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, *54*(2), 141–164. Https://Doi.Org/10.1080/00074918.2018.1521776

Utomo, S. B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A., & Sudarsono, H. (2020). Promoting Islamic Financial Ecosystem To Improve Halal Industry Performance In Indonesia: A Demand And Supply Analysis. *Journal Of Islamic Marketing*, *12*(5), 992–1011. Https://Doi.Org/10.1108/JIMA-12-2019-0259

Wulandari, P. (2019). Enhancing The Role Of Baitul Maal In Giving Qardhul Hassan Financing To The Poor At The Bottom Of The Economic Pyramid: Case Study Of Baitul Maal Wa Tamwil In Indonesia. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, *10*(3), 382–391. Https://Doi.Org/10.1108/JIABR-01-2017-0005

Yuningsih M, A. A., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Industri Halal Di Indonesia. *Al-Tijary*, *8*(2), 155–169. Https://Doi.Org/10.21093/At.V8i2.7652

Zainuddin Zainuddin. (2021). Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *5*(2), 114–128. Https://Doi.Org/10.35316/Istidlal.V5i2.335